

WONOMULYO: DARI KOLONISASI KE TRANSMIGRASI 1937-1952

(*WONOMULYO: FROM COLONISATION TO
TRANSMIGRATION 1937-1952*)

Muhammad Amir

Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan
Jl. Sultan Alauddin Km 7 Talasapang Makassar 90221
Telp. (0411) 885119, Fax (0411) 865166, HP 081343797300
E-mail: muh.amir69@gmail.com

Ratnah Rahman

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
E-Mail: ratnahrahman@gmail.com

ABSTRACT

The research is not only aiming to convey and state the Dutch East Indies government policy on colonization, but it is also considering the historical dynamics of Wonomulyo from colonization to transmigration. The method used in this research is the historical method, which is explaining a problem based on the historical perspective through the phases of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The results showed that the Dutch East Indies government policy moved the residents from the densely populated areas in Javanese Island to the less of residents area outside of Javanese Island, known as colonization, which began in 1905. One of the colonization destinations areas, in South Sulawesi, was Distrik Mapilli (Onder Afdeling Polewali Mandar), whose placement began gradually in 1937. The colonists, who came from various regions in Javanese Island, not only succeeded in opening the wilderness and grove into a yard and rice field with hard-working, but they also did not find a difficult to adapt and to have a positive response from the residents. Thus, the harmony between ethnic groups established well.

Keywords: *Wonomulyo, colonization, and transmigration.*

ABSTRAK

Kajian ini bukan hanya bertujuan mengungkap dan menjelaskan kebijakan pemerintah Hindia Belanda tentang kolonisasi melainkan juga tentang dinamika kesejarahan Wonomulyo dari kolonisasi hingga transmigrasi. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode sejarah yang menjelaskan suatu persoalan berdasarkan perspektif sejarah melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Hindia Belanda memindahkan penduduk dari daerah yang padat di Pulau Jawa ke daerah yang kurang penduduknya di luar Pulau Jawa yang dikenal dengan kolonisasi mulai dilaksanakan pada 1905. Salah satu daerah tujuan kolonisasi di Sulawesi Selatan adalah Distrik Mapilli (Onderafdeling Polewali Mandar) yang mulai dilakukan penempatan secara bertahap pada 1937. Para kolonis yang berasal dari berbagai daerah di Pulau Jawa tersebut, tidak hanya berhasil membuka hutan belantara dan belukar menjadi lahan pekarangan dan persawahan dengan susah payah tetapi mereka juga tidak sulit beradaptasi dan mendapat respon positif dari penduduk lokal sehingga keharmonisan antaretnik dapat terjalin dengan baik.

Kata kunci: Wonomulyo, kolonisasi, dan transmigrasi.

PENDAHULUAN

Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan kebijakan tentang emigrasi pada awal abad ke-20. Kebijakan tersebut tidak terlepas dari perubahan kebijakan politik pemerintah Belanda berdasarkan pidato tahta (*troom rede*) Ratu Belanda pada 1901. Dalam pidato itu, Ratu Wilhelmina menegaskan bahwa negara Belanda mempunyai kewajiban etis dan tanggung jawab moral terhadap kesejahteraan penduduk Hindia Belanda, yang kemudian diwujudkan melalui pengembangan pendidikan, emigrasi, dan irigasi. Hal inilah yang menjadi landasan pelaksanaan Politik Etis di Hindia Belanda (Poelinggomang, 2002:92; Darmiati, 1997:18)).

Khusus mengenai kebijakan tentang emigrasi, Pemerintah Hindia Belanda melalui Direktur Pemerintahan Dalam Negeri kemudian menindaklanjutinya dengan mengadakan persiapan-persiapan dan menyusun program pelaksanaan emigrasi, untuk pemindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang kurang penduduknya yang pada waktu itu dikenal dengan kolonisasi. Sesungguhnya jauh sebelum kebijakan kolonisasi itu dilaksanakan, Residen Kedu, Ter Meulen telah berkali-kali mengemukakan persoalan tentang laju pertumbuhan jumlah penduduk di daerahnya. Oleh karena itu, ia mohon kepada Pemerintah Hindia Belanda untuk mengatasi kepadatan penduduk di daerah kekuasaannya (Besluit GGHB, 30 September 1902, No.17).

Menanggapi persoalan tersebut, Gubernur Jenderal Hindia Belanda memanggil Asisten Residen Sukabumi, H.G. Heyting agar menghadap kepadanya untuk menyusun program pelaksanaan kolonisasi. Oleh karena Heyting dinilai mempunyai dedikasi dan setia kepada pemerintah serta banyak mempunyai ide, sehingga ia ditunjuk untuk melakukan penelitian terhadap: (1) kemungkinan dilakukan emigrasi keluarga-keluarga Jawa dari Pulau Jawa yang padat penduduk ke daerah yang kurang penduduknya, (2) dan tenaga kerja kontrak yang dibutuhkan oleh perkebunan swasta di luar Pulau Jawa. Direktur Pemerintahan Dalam Negeri memberi saran kepada Heyting, supaya melakukan penelitian ke daerah Jawa dibatasi lima daerah

dan ke daerah di luar Jawa dibatasi tujuh daerah (Schalkwijk,1918:117; Heyting,1938:12).

Hasil penelitian Heyting dituangkan dalam bentuk program sepuluh tahun emigrasi ke daerah Jawa dan ke luar Jawa. Untuk daerah Jawa prioritas penempatan, yaitu daerah Banyuwangi Selatan, Karawang, dan Jember. Sedangkan untuk luar Jawa pilihan utama adalah Lampung. Namun, banyak pihak yang kurang setuju dengan program sepuluh tahun dari Heyting. Oleh karena itu, pemerintah Hindia Belanda menyarankan agar mencari daerah-daerah yang padat penduduknya dan daerah penempatan yang sesuai. Selain itu, juga disarankan sebaiknya emigrasi (kolonisasi) itu dilakukan terlebih dahulu di daerah Jawa, kemudian baru ke luar Jawa (Schalkwijk,1918:117; Sudarno,1997:99). Itulah sebabnya Heyting kemudian mengubah usulannya dari sepuluh tahun menjadi program lima tahun dengan mengambil tempat seluruhnya di Lampung.

Setelah mempertimbangkan berbagai usulan dan saran-saran dari pejabat-pejabat pemerintah Hindia Belanda, serta agar jangan sampai kebijakan emigrasi itu terbengkalai, maka pemerintah memutuskan untuk mengadakan percobaan kolonisasi terlebih dahulu yang diberi nama *kolonisatieproef* (percobaan kolonisasi) pada 1905. Sebagai tahap permulaan Keresidenan Kedu (terutama Kabupaten Purworejo, Kebumen, dan Karanganyar) dipilih sebagai daerah yang sebagian penduduknya akan dipindahkan ke daerah tujuan kolonisasi. Alasannya karena sejak awal Residen Kedu telah mencemaskan laju pertumbuhan jumlah penduduk wilayahnya. Selain itu, daerah ini juga sering dilanda musim paceklik, tanah pertaniannya (sawah atau tegalan) kurang baik, irigasinya tidak baik sehingga pada musim kemarau sulit untuk ditanami padi. Petani rata-rata hanya memiliki lahan seperempat *bau* (0.17 ha) pada 1904, sehingga hidupnya miskin (*Advies Raad van Indie*, 25 Maret 1904, No. 30; Elst, 1986:155).

Daerah tujuan kolonisasi di Lampung adalah Gedung Tataan. Alasannya karena letak daerah ini lebih dekat dengan Jawa, dekat dengan jalan raya besar, daerahnya datar, dan

sumber airnya banyak sehingga cocok untuk membangun persawahan (Schalkwijk,1918:117; Sayogyo, 1986: 32; Swasono, 1986:70). Menurut Heyting bahwa pelaksanaan kolonisasi hanya dapat berhasil apabila di Lampung diciptakan suasana yang sama dengan Pulau Jawa sehingga para kolonis tidak merasa asing di daerah baru. Oleh karena itu, pemerintah menyarankan nama daerah-daerah baru tersebut disamakan dengan nama daerah asal para kolonis. Prinsip ini menjadi pegangan dan dijadikan pedoman bagi pemerintah dalam kebijakan kolonisasi dan berusaha sedapat mungkin meniru suasana Jawa di daerah baru para kolonis (MGS, 18 Februari 1905,No.718; Darmiati,1997:19).

Salah satu daerah tujuan kolonisasi dalam perkembangannya di Sulawesi Selatan adalah Distrik Mapilli dalam Onderafdeling Polewali (Mandar), yang kemudian berubah nama menjadi Wonomulyo. Oleh karena itu, kajian tentang dinamika kesejarahan Wonomulyo dari kolonisasi hingga transmigrasi sangat relevan dan penting dilakukan. Oleh sebab itu, selain dapat memberikan pemahaman tentang dinamika kesejarahan Wonomulyo, juga dapat memberikan petunjuk dalam membangun karakter dan jati diri bangsa serta dalam meningkatkan kesadaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping itu, juga dapat menyumbangkan pemikiran-pemikiran yang baik dalam penataan pemerintahan dan pemantapan integrasi bangsa, agar terluput dari gejala disintegrasi bangsa di dalam membangun kekinian dan hari esok.

Sehubungan dengan itu, persoalan pokok yang hendak dijawab dalam kajian ini adalah bagaimana latar belakang dan awal pelaksanaan emigrasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang lebih dikenal dengan kolonisasi. Selain itu, juga tentang perkembangan daerah itu dari kolonisasi Mapilli menjadi transmigrasi Wonomulyo. Oleh karena itu, kajian ini tidak hanya bertujuan mengungkap dan menjelaskan berbagai hal menyangkut latar belakang dan awal pelaksanaan kebijakan kolonisasi, tetapi juga tentang dinamika kesejarahan dan dinamika hubungan antaretnik di Wonomulyo (Polewali Mandar). Persoalan-persoalan yang

melatari kehadiran berbagai etnik dan perubahan sosial yang menyertainya harus diungkapkan atau tidak dapat diabaikan dalam memahami dinamika kesejarahan dan hubungan antaretnik dalam menata kehidupan bersama di daerah Mandar. Selain itu, kajian ini juga dapat meningkatkan pengetahuan dan membuka cakrawala pemikiran dalam memahami peristiwa masa lampau yang mempunyai makna historis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan studi kepustakaan bahwa terdapat sejumlah kajian atau laporan tentang kolonisasi di Mapilli (Mandar). Salah satu di antaranya adalah laporan dari aparat pemerintah Hindia Belanda, yaitu W. J. Leyds yang menulis *Memori van Overgave Assistent Resident Mandar* (1940). Memori serah terima jabatan ini tidak saja menguraikan secara singkat tentang latar belakang dan perkembangan kolonisasi di Mapilli, tetapi juga menyajikan sejumlah data penting tentang Mandar selama ia bertugas di daerah tersebut. Baik yang berkaitan dengan keadaan geografis, penduduk, sejarah (1500-1900), keadaan sosial, budaya, ekonomi, dan pemerintahan pribumi. Selain itu, karya M. Amral Sjamsu yang berjudul *Dari Kolonisasi ke Transmigrasi* (1959). Karya ini bukan hanya menguraikan perkembangan penyelenggaraan kolonisasi terutama di Sumatra, melainkan juga pelaksanaan kolonisasi di Sulawesi, Kalimantan, dan tempat-tempat lainnya di Indonesia. Bahkan ia juga menguraikan perkembangan awal penyelenggaraan transmigrasi di Indonesia.

Karya lainnya adalah *Transigrasi di Indonesia 1905-1985* oleh Sri Edi Swasono dan Masri Singaribuan (editor) yang diterbitkan dalam rangka memperingati Delapan Puluh Tahun (*Sepuluh Windu*) Transmigrasi Indonesia (1985). Berikutnya adalah *90 Tahun Kolonisasi, 45 Tahun Transmigrasi: Redistribusi Penduduk di Indonesia* oleh Muhajir Utomo dan Rofiq Ahmad (editor), dan karya H.J Heeren dengan judul *Transmigrasi di Indonesia* (1979). Karya-karya tersebut sangat membantu dalam memahami perkembangan kolonisasi dan transmigrasi, baik di Wonomulyo maupun di

Indonesia. Semua sumber atau karya tersebut menjadi rujukan dalam penelitian ini.

Kajian tentang Mandar juga menjadi rujukan, misalnya karya Darmawan Mas'ud Rahman, tentang sistem nilai budaya orang Balanipa Mandar (1988). Karya yang berupa disertasi ini merupakan salah satu sumber yang amat membantu dalam memahami kehidupan sosial dan budaya politik orang Balanipa Mandar. Karya lainnya adalah sejarah Mandar oleh M.T. Azis Syah (1997). Karya yang berjumlah tiga jilid ini hanya menyajikan secara deskriptif sejarah kerajaan-kerajaan di Mandar dan tidak sistematis. Sementara A. Saiful Sinrang menulis sejarah singkat tentang berbagai peristiwa perjuangan rakyat Mandar dalam menentang Belanda (1994). Selain itu, Saharuddin menulis tentang Pitu Babana Binanga (Mandar) dalam lintasan sejarah pemerintahan di Sulawesi Selatan (1985). Meskipun karya ini menyajikan sejumlah data penting, antara lain hubungan Mandar dengan kerajaan lainnya dan pemerintah Hindia Belanda, susunan pemerintahan, dan sistem pengangkatan pejabat kerajaan. Namun, ia tidak menguraikan latar belakang dan proses terbentuknya persekutuan di daerah Mandar serta tidak menggunakan *lontarak* sebagai rujukannya. Sebelumnya Saharuddin juga telah menulis tentang susunan dan sistem pemerintahan Balanipa.

Deskripsi tentang budaya etnik Mandar dilakukan oleh Muhammad Ridwan Alimuddin dalam karyanya yang berjudul *Orang Mandar Orang Laut* (2005). Karya ini selain menunjukkan bahwa orang Mandar adalah pelaut ulung, juga tentang keunggulan budaya bahari Mandar pada daya cipta mereka untuk terus menerus menyesuaikan diri terhadap gelombang perubahan zaman. Sementara Ibrahim Abbas menulis tentang pendekatan budaya Mandar (1999), dan Edward L. Poelinggomang menulis tentang sejarah dan budaya Sulawesi Barat (2012). Kedua karya yang terakhir disebutkan ini, selain mengungkap beberapa aspek budaya Mandar juga menguraikan sedikit tentang sejarah Mandar.

METODE

Metode yang digunakan untuk menjawab persoalan penelitian, diperlukan analisis berdasarkan metode sejarah. Sebuah metode yang merekonstruksi kembali masa lampau melalui tahapan kerja pengumpulan sumber-sumber sejarah, menilainya secara kritis, dan menyajikan dalam bentuk narasi sejarah. Dua jenis sumber yang digunakan dalam kajian ini, yaitu sumber lisan dan sumber tertulis. Sumber lisan berupa hasil wawancara dengan para kolonis generasi pertama atau yang datang bersama orang tua mereka dan putra-putri para kolonis atau generasi kedua, mantan kepala kampung atau lingkungan, kepala desa, camat, dan tokoh masyarakat (Jawa, Mandar, dan Bugis) di Wonomulyo yang memiliki kapabilitas tentang kajian ini. Sementara sumber tertulis berupa dokumen-dokumen pemerintah pada zaman Hindia Belanda dan arsip pemerintah Kabupaten Polmas (Polewali Mamasa) yang tersimpan pada lembaga kearsipan. Selain itu, juga menggunakan manuskrip lokal yang disebut *lontarak* (manuskrip yang semula ditulis pada daun lontar) dan sumber tertulis lainnya, baik yang berupa buku dan artikel maupun laporan penelitian yang berkaitan dengan kolonisasi atau transmigrasi pada sejumlah tempat dan di Wonomulyo. Sumber yang telah dikumpulkan tersebut dianalisis melalui tahapan kritik sumber, interpretasi, dan kemudian direkonstruksi menjadi narasi sejarah tentang dinamika kesejarahan Wonomulyo dari kolonisasi hingga transmigrasi.

PEMBAHASAN

Sebelum membahas lebih lanjut tentang pelaksanaan emigrasi atau kolonisasi, terlebih dahulu diuraikan persamaan dan perbedaan antara kolonisasi dengan transmigrasi. Persamaannya adalah pemindahan penduduk secara berencana dan terorganisasi dari Pulau Jawa ke luar Pulau Jawa atau pulau-pulau lain di wilayah Hindia Belanda atau Indonesia. Namun tujuannya jelas berbeda. Kolonisasi ditujukan untuk menyediakan tenaga kerja (kuli) murah bagi perusahaan-perusahaan

perkebunan, pabrik-pabrik, pertambangan milik Belanda atau banga Asing lainnya, baik yang sudah berdiri maupun yang akan didirikan di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah Hindia Belanda telah melakukan ekspansi perluasan perkebunan atau perusahaan untuk keperluan eksponya ke luar Jawa sejak 1900 (Admosudirdjo, 1970:14). Karena itu tidak berlebihan kalau ditegaskan bahwa penyelenggaraan kolonisasi, semata-mata adalah untuk kepentingan kaum kapitalis Barat yang memerlukan tenaga buruh yang terampil dan murah dalam mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari tanah jajahan di Hindia Belanda.

Transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah pada zaman kemerdekaan Indonesia mempunyai tujuan dan sasaran yang sama sekali berbeda dengan kolonisasi. Tujuan utama penyelenggaraan transmigrasi adalah peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan para transmigran itu sendiri bersama-sama dengan penduduk setempat di daerah penerima transmigrasi itu. Selain itu, dalam penyelenggaraan transmigrasi juga dimaksudkan sebagai pemerataan pembangunan di wilayah Republik Indonesia dalam kerangka pembangunan nasional (Martono, 1985: iv). Transmigrasi adalah salah satu usaha dan tindakan konkret pemerintah dan rakyat Indonesia untuk mengisi kemerdekaan bangsanya yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Awal Pelaksanaan Kolonisasi

Pelaksanaan percobaan kolonisasi gelombang pertama dikirim sejumlah 155 kepala keluarga ke tempat yang telah disediakan di Gedong Tataan, Afdeling Teluk Betung (Way Lima) Lampung Selatan pada awal 1905. Tempat kolonisasi pertama itu diberi nama Desa Bagelen karena kebanyakan para kolonis itu berasal dari Kabupaten Bagelen (Purworejo) di Keresidenan Kedu di Pulau Jawa. Pemerintah Hindia Belanda kemudian mengirim lagi sejumlah 313 keluarga pada Maret 1905, sehingga terbentuklah dusun tambahan Karanganyar dan Kutoarjo di Desa Bagelen. Ongkos perjalanan

para kolonis ke tempat kolonisasi (Gedong Tataan) ditanggung pemerintah. Selain itu, mereka juga mendapat biaya domisili (*verblijfkosten*) sebesar f. 22.50, termasuk untuk membeli alat-alat pertanian. Batas usia para kolonis dibatasi paling tinggi 40 tahun atau yang sudah berkeluarga. Pada permulaan pelaksanaan kebijakan ini, para kolonis yang baru datang ditempatkan di los-los (barak-barak) sebelum perumahan mereka dibangun. Rumah-rumah sederhana dengan pola Jawa didirikan di atas tanah pekarangan milik para kolonis yang luasnya seperdua *bau* (Schalkwijk, 1918:419).

Kolonisasi gelombang kedua pada 1907, masih merupakan percobaan yang dilakukan Pemerintah Hindia Belanda. Percobaan kedua ini dikoordinasi oleh van Dissel (pemimpin percobaan kolonisasi) yang memberangkatkan 555 keluarga, termasuk 40 orang tukang ukur tanah untuk membuka lahan baru. Nama daerah tujuan kolonisasi kedua ini dikenal dengan Desa Gadingrejo, dan letaknya tidak jauh dari koloni pertama (Besluit GGHB, 7 Maret 1906, No. 5). Seperti pada kolonisasi pertama di Desa Bagelen, pemukiman kedua di Desa Gadingrejo juga belum memenuhi target. Daerah ini masih mampu menampung pendatang-pendatang baru. Untuk tujuan ini diperlukan bantuan pamong praja setempat untuk melakukan propaganda. Itulah sebabnya Gubernur Jenderal Hindia Belanda minta kepada Residen Kedu supaya memerintahkan Bupati Karanganyar bersama lima orang kepala desa di daerah kabupatennya untuk bersama-sama meninjau pemukiman para kolonis di Lampung.

Pemerintah Hindia Belanda menanggung biaya perjalanan, dengan ketentuan bahwa bupati berhak mendapat ongkos perjalanan kereta api dan kapal api kelas satu ditambah uang harian 10 gulden. Sementara untuk kepala desa ongkos kereta api dan kapal api kelas tiga serta uang harian 1.50 gulden. Maksud pengiriman ini tidak lain agar mereka dapat membantu pemerintah Hindia Belanda mendorong penduduk mau melakukan kolonisasi (Besluit GGHB, 20 November 1907, No. 4). Pada tahun-tahun berikutnya dengan maksud dan tujuan yang sama dikirim pula

Bupati Purworejo bersama dengan lima kepala desa dari daerahnya selama lima minggu untuk meninjau lokasi yang sama (Besluit GGHB,9 Juni 1909, No.27).

Kolonisasi gelombang ketiga dengan jumlah 200 kepala keluarga diberangkatkan pada 1909. Para kolonis ini ditempatkan pada lokasi yang berdekatan dengan Desa Bagelen. Koloni baru ini kemudian diberi nama Desa Purworejo, dengan dusun-dusun tambahan Tegalsari, Purwosari, dan Karangrejo (Besluit GGHB, 8 Februari 1909, No. 7). Berikutnya penempatan percobaan kolonisasi gelombang keempat dilakukan pada 1911, dengan memberangkatkan sebanyak 300 kepala keluarga. Tempat para kolonis ini diberi nama Desa Wonodadi, dengan dusun-dusun tambahan Wonosari dan Wonokriyo (Besluit GGHB, 19 Oktober 1911, No.30). Penempatan percobaan kolonisasi terakhir atau gelombang kelima dilakukan di Tambahrejo pada 1913, masih berada di daerah Lampung. Pada tahap terakhir ini diberangkatkan sebanyak 400 kepala keluarga ke Desa Tambahrejo (Besluit GGHB,25 Februari 1913, No.37). Selain itu, pemerintah Hindia Belanda juga telah membuka daerah baru untuk percobaan kolonisasi, yaitu pengiriman kolonis ke Muara Aman (Bengkulen) pada 1913 (Besluit GGHB, 21 April 1913, No. 30).

Permukiman tersebut menunjukkan bahwa pada umumnya nama desa di daerah kolonisasi menggunakan nama desa asal. Permukiman pertama meliputi Desa Bagelen dengan dusun tambahan Karanganyar dan Kutoarjo. Permukiman kedua meliputi Desa Gadingrejo. Permukiman ketiga meliputi Desa Purworejo dengan dusun tambahan Telagasari, Purwosari, dan Karangrejo. Permukiman keempat meliputi Desa Wonodadi dengan dusun tambahan Wonosari dan Wonokriyo, dan permukiman kelima meliputi Desa Tambahrejo (Kolonisatie Bulletin, 1937:4; Swasono,1986:70).

Selain nama desa, adat kebiasaan Jawa masih tetap dipertahankan walau sudah berada di luar Jawa. Sedang hubungan mereka dengan penduduk asli Lampung dapat dikatakan cukup baik. Menurut Schalkwijk, bahwa pernah ada beberapa kali terjadi pertikaian perbatasan

daerah, tetapi penduduk asli Lampung masih tetap merasa memiliki keuntungan dengan keberadaan para kolonis. Oleh karena penduduk asli dapat memanfaatkan tenaga kerja mereka sebagai tenaga upahan, misalnya mencangkul di sawah, menumbuk padi, dan memetik lada. Namun pemerintah Hindia Belanda merasa tidak puas terhadap hasil percobaan kolonisasi di Gedong Tataan karena tidak diikuti dengan perpindahan penduduk spontan (Schalkwijk,1918:420;Craendijk,1918:27).

Upaya mendukung kelangsungan pelaksanaan kolonisasi dari Jawa ke Lampung (Sumatra), pemerintah Hindia Belanda mendirikan Lampongshe Bank pada 1912. Hal ini sebagai realisasi atas usul Residen Lampung van Dissel sebelumnya, bahwa untuk mengurangi beban biaya dari pemerintah dan melayani keperluan para kolonis di Bagelen, Karanganyar, Gadingrejo, Purworejo, Teluk Betung, dan sekitarnya perlu didirikan bank kredit di Lampung. Setiap keluarga dapat mengambil kredit 200 gulden hingga 300 gulden untuk membeli hewan ternak penarik bajak dan alat-alat pertanian untuk membuka hutan. Sejak itu pemimpin percobaan kolonisasi bekerja sama dengan pemimpin Lampongshe Bank untuk menangani kolonisasi. Karena itu, para kolonis yang datang pada 1913, hanya mendapat biaya hidup f. 22.50. Sedangkan, untuk keperluan membangun rumah dan membeli alat-alat pertanian serta yang lainnya dipersilahkan memimjam di bank maksimal f. 200, untuk diangsur selama 10 tahun dengan bunga sembilan persen per tahun. Akan tetapi, kebanyakan kolonis hanya memimjam tidak lebih dari f. 10 (Besluit Residen Lampung, 9 Agustus 1911, No.2748; Schalwijk,1918:430).

Maksud pemerintah untuk memberikan bantuan kepada para kolonis melalui kredit ternyata meleset. Cicilan pembayaran dengan bunga 9 persen per tahun yang harus mulai dibayar pada awal tahun ketiga ternyata tidak dapat dipenuhi oleh para kolonis. Hal ini disebabkan karena para kolonis tidak mampu mengelola modal pinjaman atau berkecimpung dalam dunia perkreditan. Uang pinjaman yang sedianya untuk modal

mengolah tanah digunakan untuk meminum minuman keras, candu, selamatan, membeli baju baru, sehingga pembayaran kembali mengalami kemacetan. Pada 1919 tercatat 78 kolonis yang tidak mampu membayar sehingga melarikan diri ke tempat lain. Juga sebanyak 59 kolonis meninggal dunia sehingga uang tidak kembali. Jadi jumlah keseluruhan uang yang tidak dapat ditagih kembali sebanyak 5.946,96 gulden. Itulah sebabnya Lampongshe Bank mengalami defisit besar pada 1926, sehingga bangkrut dan kemudian ditutup pada 1928 (Darmiati,1997:20).

Pelaksanaan program kolonisasi yang penuh ambisius untuk memindahkan penduduk Jawa ke Lampung selama 1905-1913, ternyata dapat dikatakan kurang berhasil. Perhatian penduduk Jawa untuk pindah ke daerah luar Pulau Jawa tidak memenuhi target. Di samping itu, juga penyakit yang muncul di daerah koloni, seperti malaria, disentri, cacing tambang sangat banyak sehingga angka kematian sangat tinggi. Karena itu pemerintah Hindia Belanda menghentikan pengiriman ke daerah koloni sejak 1914. Pemerintah baru menggiatkan kembali kolonisasi pada 1921, dengan membuka daerah baru di Kota Agung, Lampung untuk para kolonis yang berasal dari Wonosobo (Jawa Tengah). Oleh karena itu, desa intinya pun diberi nama Desa Wonosobo. Seiring dengan pembukaan Kota Agung, pemerintah Hindia Belanda juga melakukan percobaan kolonisasi ke daerah lain seperti Rawah Kamentara, Kapahiyang, dan Muara Aman di Lebong, Bengkulu, Palembang, Aceh, Sulawesi, Kalimantan, dan Timor (*Advies Raad van Indie*,6 Februari 1925, No. 22;Darmiati,1997:20).

Persoalan perencanaan dan persiapan yang dilakukan secara tergesa-gesa terhadap pemilihan lokasi ternyata kurang tepat. Demikian pula tentang keadaan penduduk asli kurang diperhatikan sehingga tidak jarang terjadi konflik dengan para kolonis. Perkembangan teknologi dalam membangun pengairan besar dan alat-alat angkut (transportasi) baik di darat maupun di sungai kurang diperhatikan, sehingga keadaan daerah-daerah koloni pada umumnya tidak memuaskan (BGS,18 September 1928,

No.2013/8). Akibatnya orang tidak mempercayai lagi gagasan kolonisasi yang dilancarkan pemerintah. Hanya krisis dan depresi ekonomi yang sedang melanda dunia sekitar 1930-an, kembali menghidupkan rencana-rencana kolonisasi. Pada tahun-tahun tersebut perekonomian dunia sedang berada pada titik terendah. Kegoncangan ini sangat mempengaruhi kehidupan perkebunan-perkebunan di Sumatera Timur. Tempat pemasaran di Eropa dan Amerika tidak mampu lagi membeli hasil produksi perkebunan-perkebunan tersebut serta beribu-ribu buruh dipulangkan ke Jawa (Darmiati, 1997:22).

Kepulangan buruh tersebut membawa kesulitan bagi pemerintah setempat di Jawa karena mereka tidak lagi memiliki tanah garapan atau pekerjaan sehingga menjadi pengangguran. Karena itu pemerintah Hindia Belanda giat menghidupkan kembali rencana kolonisasi saat itu. Berbagai cara dilakukan untuk menggalakkan program kolonisasi tersebut, baik melalui propaganda, selebaran, dan brosur maupun pembuatan film tanah seberang. Dalam menangani pelaksanaan kolonisasi, pemerintah membentuk suatu komisi yang diberi nama *Central Kolonisastie Kommitte* (CKC), dengan tugas: (1) memberi saran kepada pemerintah kemungkinan-kemungkinan pembukaan lahan bagi kolonisasi; dan (2) memberi penerangan kepada masyarakat akan arti pentingnya kolonisasi (Besluit GGHB, 23 April 1930, No.10). Namun sulit menentukan daerah yang memenuhi kriteria sebagai tempat kolonisasi, sehingga CKC mengingatkan pemerintah bahwa tujuan dari kolonisasi tidak lain untuk pemerataan dan penyebaran penduduk. Karena CKC mengusulkan supaya pemerintah segera mengeluarkan keputusan tentang ketentuan pemindahan penduduk, dengan prioritas utama pemindahan penduduk dari daerah yang padat di Jawa ke daerah luar Jawa yang masih sedikit penduduknya (Besluit GGHB, 14 Agustus 1930, No.14).

Koloni baru dibuka pada 1935, yaitu daerah terletak di hutan cadangan milik Kewedanan Sukadana yang kini terkenal dengan nama Metro. Dalam waktu singkat daerah ini berkembang dengan pesat dan dapat

menyaingi Gedong Tataan ataupun Kota Agung baik dalam jumlah kolonis maupun tingkat kesuburannya. Hal ini karena pemerintah sudah sejak awal mempersiapkan secara matang segala sesuatunya termasuk pembuatan bendungan di Way Sekampung. Meskipun telah dilakukan seleksi yang ketat bagi para calon kolonis, namun tidak dapat dihindari bahwa unsur-unsur yang tidak diinginkan juga turut pindah ke luar Jawa (Binnenlands Bestuur: No.5893).

Kolonisasi Mapilli

Gerakan pemindahan penduduk dari Jawa ke Tanah Seberang (luar Jawa) dikenal dengan nama kolonisasi (*kolonisatie*). Pemindahan penduduk dari Pulau Jawa ke Pulau Sulawesi telah dilakukan sejak 1906. Pelaksanaannya bukan dilakukan pemerintah Hindia Belanda, melainkan oleh seorang Direktur Wittekruis Kolonie di Salatiga yang bernama A. Th. J. van Emmerik. Lokasi kolonisasi yang dibuka terletak di lembah Palu Sulawesi Tengah yang kemudian diberi nama Kalawara Naputi. Pemerintah memberika subsidi f 25.000 – f 30.000 untuk penyelenggaraan kolonisasi tersebut. Emmerik memindahkan dari Jawa ke Palu sebanyak 28 keluarga kolonis secara sukarela pada Februsri 1907, yang kemudian diikuti oleh rombongan-rombongan lainnya. Namun, penyelenggaraan kolonisasi ini menemui banyak kendala atau kegagalan sehingga jumlah kolonis pada 1908 terdapat 141 keluarga dan akhir tahun 1912 hanya tinggal 146 jiwa (Sjamsu, 1956:62).

Gubernur Sulawesi dan Daerah Takluknya telah mengirim surat kepada pemerintah Hindia Belanda di Batavia tentang kolonisasi di Sulawesi Selatan. Sang Gubernur dalam suratnya pada Oktober 1919, mengusulkan pembukaan lokasi-lokasi kolonisasi di Palopo dan Masamba (Sulawesi Selatan). Oleh karena di daerah tersebut telah ada beberapa perusahaan (*onderneming*) dan akan berdiri lagi beberapa perusahaan besar bangsa Eropa. Perusahaan itu akan banyak membutuhkan tenaga kerja. Berhubung karena penyelenggaraan kolonisasi di Lampung kurang memuaskan atau tidak memberi hasil sebagaimana yang diharapkan dan juga karena kesulitan keuangan

negara, sehingga pengiriman kolonisasi terpaksa dihentikan pada 1922. Oleh karena itu, persiapan-persiapan kolonisasi di Sulawesi Selatan belum mendapat perhatian serius dari pemerintah Hindia Belanda (Sjamsu,1956:62).

Awal April 1937, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan daftar tentang lokasi atau daerah yang cukup luas di Afdeling Mandar, yang memungkinkan dijadikan sebagai daerah kolonisasi bagi orang Jawa. Disebutkan bahwa di Mamuju terdapat tiga lokasi berupa lahan datar yang cukup luas. Selain di Mamuju, juga terdapat lokasi dekat Mapilli, Onderafdeling Polewali yang dapat dijadikan sebagai daerah kolonisasi. Namun, di daerah Mapilli juga terdapat cukup banyak tanaman berupa kebun buah-buahan milik penduduk asli (Mandar). Mereka (penduduk asli) itu dipindahkan oleh Kontrolir Dieudenne dan Adjen Lanbau Harahap untuk tinggal menetap di Mapilli. Di samping itu, juga terdapat cukup banyak transmigran lokal (Bugis) yang dengan susah payah diajak untuk pindah bertempat tinggal di daerah tersebut. Untuk kedua kelompok itu dibuat empat buah bendungan irigasi bagi persawahan dan kesemuanya itu menjadikan sebagai suatu pemukiman yang baik. Sesungguhnya kawasan ini sudah lama ditinggalkan, bahkan sudah ratusan tahun tidak dihuni (di masa lalu di dataran antara Campalagian dan Mapilli) pernah ditinggali orang, karena masih terdapat bekas-bekas persawahan. Tetapi menurut informasi bahwa para pemukim waktu itu telah meninggalkan daerah tersebut karena selalu dipaksa membayar pajak, jika tidak rumahnya dibakar oleh orang-orang yang suka merampok (Arsip Polmas, No. 187; Leyds,1940:96).

Rencana pemerintah Hindia Belanda menempatkan kolonisasi di daerah yang telah disediakan di Mamuju untuk sementara dibatalkan. Sebagai gantinya Asisten Residen Mandar menetapkan daerah dekat Mapilli sebagai daerah kolonisasi. Ia selanjutnya memerintahkan kepada Swapraja Balanipa per beslit tanggal 22 April 1937 No. 4, untuk mempersiapkan daerah itu bagi para kolonis Jawa. Pemerintah juga melakukan pemeriksaan dan penilaian atas keadaan tanah di lokasi itu untuk pembuatan irigasi. Hasil penelitian dari

instansi terkait, termasuk dari ilmu tanah dan kesehatan ternyata cukup baik. Pada awal Juni 1937 diberitakan akan dimulai penempatan bagian yang penting (*kern* = inti) 150 kepala keluarga kolonis yang pertama dan mereka akan tiba pada akhir Agustus 1937. Oleh karena itu, dilakukan kerja keras untuk menyelesaikan berbagai persoalan tepat pada waktunya, baik mengenai pelepasan hak atas tanah-tanah kebun dengan sebaik-baiknya maupun mengenai penafsiran ganti kerugian yang harus dibayar lunas secara teliti (Amir,2016:98).

Berdasarkan laporan bahwa sebelum penempatan para kolonis terdapat sekitar 60 hektar sawah yang baru dicitak. Sawah-sawah tersebut, sekitar baru dua tahun dimiliki oleh para penggarap dan harus dibeli dengan tunai. Demikian pula dengan pekarangan rumah, kebun, pengeboran, dan kerugian atas penggalian irigasi dengan jumlah keseluruhannya dan dibagi dalam 3 tahun adalah sebesar f 10.313,63 harus dibayar dengan tunai. Pada mulanya mereka disediakan los-los atau barak-barak tempat tinggal sementara berupa kamar-kamar tersendiri, gudang penyimpanan makanan, alat-alat pertanian, bibit-bibit tanaman, atap nipah atau rumbia, termasuk juga untuk semen, dan sebagainya. Selain itu, juga disediakan sebuah pendopo atau *baruga*, sebuah pasar, dan sebuah poliklinik. Juga sebuah rumah untuk seorang pejabat asisten wedana. Sumur-sumur harus digali, irigasi, dan perencanaan penyaluran air serta penggalian atau perbaikan terlebih dahulu dilakukan penjelajahan ke daerah yang akan dilewati, jalan dibuat dan buruh harus dicari. Di samping itu, makanan, alat-alat pertanian dan bibit pelbagai tanaman serta atap untuk rumah para kolonis, harus dibeli dan kadang kala tidak terhitung kehilangan waktu pada saat mencarinya. Jumlah hasil pemesanan atap misalnya, melebihi jumlah seluruh pesanan yang pernah dikerjakan dan perlu dibagi kepada sejumlah distrik, serta semua kampung digerakkan serentak membuat atap (Leyds,1940:97).

Lebih lanjut disebutkan bahwa semua pekerjaan yang begitu banyak dan bertumpuk tersebut ternyata dapat diselesaikan tepat pada

waktunya, berkat adanya kerja keras dari pemerintah dan tanpa mengenal lelah dari *Gezachebber* (Penguasa Sipil) Polewali G. F. de Graaff, dan semangat kerja teman sejawat dan bawahannya. Dengan sendirinya beredar cukup banyak uang di antara penduduk di mana-mana dibuka banyak warung dan toko-toko kecil, semua para pedagang memperoleh banyak keuntungan. Oleh karena itu dengan senang hati setiap orang menanti kedatangan orang-orang Jawa. Berdasarkan ketentuan pemerintah Hindia Belanda ketika itu, bahwa setiap kolonis sebagai kepala keluarga akan memperoleh satu hektar tanah persawahan dan seperlima hektar tanah pekarangan atau halaman rumah. Para kolonis gelombang pertama (1937) yang sebagian besar adalah petani, mula-mula memperoleh tanah persawahan seperdua hektar dan sisanya yang seperdua hektar menyusul kemudian (Leyds, 1940: 97; Amir,2016:99).

Para kolonis gelombang pertama yang berasal dari berbagai daerah di Pulau Jawa, diangkut dengan kapal KPM (*Koninklijke Paketvaart Maatschappij*) dan tiba di dermaga Polewali pada 1 September 1937. Para kolonis itu terdiri atas 115 keluarga dengan 380 jiwa. Hal ini berarti tidak sesuai dengan target semula yang berjumlah 150 keluarga. Sesudah diregistrasi dan disuntik, mereka diangkut dengan mobil ke lokasi penempatan para kolonis di Mapilli. Setelah sampai pada tempat yang sudah disediakan, mereka diberi minum secangkir teh panas pada tengah hari dan makan nasi. Penduduk setempat terheran-heran melihat mereka, sehingga daerah itu dilarang dimasuki untuk sementara. Pada sore harinya, mereka menarik undian untuk memperoleh halaman rumah masing-masing, sesudah ditentukan pembagian kelompok dan kepada setiap kelompok diberi satu kompleks halaman rumah. Sementara tanah untuk persawahan, setengah hektar pertama baru ditentukan kemudian (Leyds,1940:97; Sjamsu,1956:63).

Lokasi para kolonis gelombang pertama tersebut, ditempatkan di dekat jalan raya Polewali – Majene. Daerah ini yang kemudian diberi nama Desa Sidodadi dipimpin langsung kepala rombongan R. Soeparman

yang berasal dari Bojonegoro, Jawa Timur. Ia juga sebagai Asisten Wedana pertama Kolonisasi Mapilli. Selain memperoleh tanah (lahan persawahan dan lahan pekarangan rumah), para kolonis juga memperoleh bahan makanan, perabotan masak, alat-alat pertanian, dan bibit tanaman yang diperlukan. Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan para kolonis harus dibayar kembali dan mereka diberikan kelonggaran membayar secara cicilan selama tiga tahun. Singkatnya, semua harus dibayar kembali, termasuk ongkos perjalanan dan bahan-bahan lainnya kepada negara (Leyds,1940:98; Amir,2016:99).

Kolonis gelombang kedua didatangkan ke Mapilli pada 1938, terdiri atas 710 keluarga dengan sejumlah 3.335 jiwa. Mereka ditempatkan di Desa Sumberjo, Campurjo, dan Sidorejo yang tidak jauh dari Desa Sidodadi dan dekat dengan jalan raya Polewali – Majene (Leyds,1940:98; Sjamsu,1956:64; Bachtiar, 2000: 53). Namun, para kolonis gelombang kedua dan gelombang-gelombang berikutnya hanya memperoleh tanah persawahan seperdua *bouw* pertama dan seperdua *bouw* berikutnya atau bukan lagi seperdua hektar.¹ Sesungguhnya para kolonis dapat saja menggarap sawah lebih dari itu, tetapi dari kebanyakan di antara mereka satu *bouw* sudah sangat berat, dan ada juga di antara mereka yang menolak pemberian tambahan setengah *bouw* yang kedua, karena penggarapan yang pertama saja belum selesai. Pada 1939 didatangkan lagi para kolonis ke Mapilli, terdiri atas 461 keluarga dengan sejumlah 1.862 jiwa. Para kolonis gelombang ketiga ini ditempatkan di Labuku (sekarang, Desa Bumiayu) sebagai tempat tinggal mereka yang baru). Terletak sekitar lima kilometer dari jalan raya (poros Polewali – Majene), menyusur jalanan mobil yang baru dibuat menuju selatan (Leyds,1940:98; Bahri,1997:63).

Pemberangkatan kolonis selanjutnya dilakukan pada 1940. Kedatangan kolonis ini merupakan gelombang keempat atau kelompok terakhir ke Mapilli, terdiri atas 183 keluarga dengan sejumlah 913 jiwa. Mereka

ditempatkan di Desa Arjosari dan Kebunsari. Oleh karena itu, jumlah keseluruhan para kolonis di Mapilli pada akhir 1940 adalah 1.569 keluarga dengan sebanyak 5.470 jiwa (Sjamsu,1956:64).² Para kolonis tersebut didatangkan dari berbagai daerah di Pulau Jawa, misalnya dari Jawa Timur (Jombang, Nganjuk, Kediri, Tulung Agung, Ponorogo, Ngawi, dan Pacitan); dari Jawa Tengah (Semarang, Magelang, Blora, Salatiga, Jepara, Purworejo, Kebumen, Kutoarjo, Bruno, Surakarta, dan Jogjakarta); dari Jawa Barat (Cirebon dan Kuningan). Mereka ditempatkan pada tujuh desa, yaitu Desa Sidodadi, Desa Sumberjo, Desa Campurjo, Desa Sidorejo, Desa Bumiayu, Desa Arjosari, dan Desa Kebunsari (Arsip Polmas, No. 58). Ketujuh desa ini dikenal sebagai daerah Kolonisasi Mapilli, setingkat dengan onder distrik yang dikepalai oleh seorang Asisten Wedana (R. Soeparman) yang berada di bawah langsung Penguasa Sipil (*Gezachebber*) Polewali. Asisten Wedana dibantu oleh beberapa tenaga terampil, misalnya tenaga pengajar (guru) dikepalai R. Mulyono, tenaga medis (kesehatan) dikepalai R. Subaker, Tenaga pertanian (*land bouw*) dikepalai R. Sukiran), bidang pertanahan (mantri ukur) dikepalai Tahalele, dan tenaga terampil lainnya (Leyds,1940:100; Sumedi,2014:6).

Setahun setelah kedatangan para kolonis yang semula tinggal di sebuah rumah sederhana atau los-los yang dibangun secara tergesa-gesa, sebagian telah berhasil mengganti rumahnya secara berangsur-angsur yang lebih baik. Beberapa kolonis membangun rumah batu, tetapi kebanyakan masih rumah kayu. Biasanya sebuah rumah dengan dinding bambu dan tiang-tiang dari kayu. Sementara tanah persawahan tercatat kurang lebih 500 hektar telah selesai dibangun atau dicetak pada 1940. Luas tanah persawahan tersebut baru sebagian kecil dari 4.500 hektar lahan yang diperuntukan bagi para kolonis di Mapilli.

¹ Satu *bouw* sama dengan sekitar 0,71 hektar atau sekitar 7.096,50 meter persegi

²Namun jumlah kolonis tersebut berbeda dengan sumber dari Kementerian Penerangan Republik Indonesia. Sebab berdasarkan statistik jumlah penduduk Kolonisasi Mapilli pada akhir Desember 1940 adalah sebanyak 5.490 jiwa (Kementerian Penerangan,1953:426).

Demikian pula pekarangan atau halaman rumah para kolonis, dimanfaatkan atau ditanami dengan bermacam-macam tanaman, seperti ubi kayu, jagung, pelbagai jenis kacang-kacangan, dan pisang. Bahkan beberapa di antara mereka yang menanam padi di halaman rumahnya. Meskipun panen pertamanya kurang memuaskan, namun mereka telah menikmati hasilnya. Hasil panen pertama sawah para kolonis, juga tidak begitu memuaskan. Demikian pula hasil rata-rata dari penanaman keduanya, juga kurang sedikit dari persawahan yang sudah lama dikerjakan pada tanah yang sedang-sedang saja (Leyds,1940:99; Sjamsu,1956:64).

Sumber lain menyebutkan bahwa hasil sawah para kolonis rata-rata 44 kwintal/ha, tetapi karena gangguan hama tikus sehingga hasilnya menurun menjadi 19 kwintal/ha pada 1938. Demikian juga pada 1939, hasilnya kurang baik karena mengalami kekeringan, sedangkan pengairan belum selesai. Sawah yang terlambat dikerjakan hanya menghasilkan padi kering 15 kwintal/ha. Sementara pekarangan para kolonis memberikan hasil yang baik, seperti padi kering rata-rata 19,7 kwintal/ha, jagung bertangkai 24 kwintal/ha, dan kacang tanah 14 kwintal/ha. Namun hasil pekarangan tersebut mengalami penurunan karena pengaruh kekeringan pada 1940, seperti padi kering rata-rata 16 kwintal/ha, jagung bertangkai 22 kwintal/ha, tetapi kacang tanah naik menjadi 18 kwintal/ha. Begitu pula hasil sawah para kolonis yang mengalami kekeringan pada 1940, sehingga hasilnya hanya rata-rata 17 kwintal/ha padi kering (Sjamsu, 1956:64).

Para kolonis dalam pengolahan sawah mempergunakan kerbau yang dipinjamkan oleh *landschap*. Selain itu, juga penduduk asli yang kaya memijamkan kerbau mereka dengan upah berupa hasil panen sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Namun kerbau tersebut, hanya dipinjamkan sebagai ternak kerja dalam pengolahan sawah. Menurut Leyds bahwa selain kerbau, saatnya juga dipergunakan sapi dalam pengolahan sawah, sebab semua genangan air yang selama ini menjadi hambatan sudah disalurkan melalui saluran irigasi, sehingga tanah (wasah) telah menjadi

cukup kering (Leyds,1940:100). Oleh karena sapi sesungguhnya tidak menuntut banyak perhatian, prestasinya pada tanah kering banyak sekali, daya tahannya besar sekali, di samping mampu melawan pengaruh yang berbahaya dari iklim basah, dan sapi itu juga berkembang biak sangat cepat. Tambahan pula sebagian besar dari para kolonis sudah sangat terbiasa bekerja dengan sapi. Selain itu, juga yang agak penting bahwa kerbau yang dapat dibeli atau diperjualbelikan seringkali tidak biasa dipekerjakan dan juga tidak jinak seperti di Jawa (Leyds,1940:100).

Sementara di bidang pendidikan telah dibuka di daerah kolonisasi sebuah sekolah rakyat dengan murid sebanyak 112 orang murid pada Desember 1939. Selanjutnya akan dibuka sekolah yang kedua di Labuku pada 1940. Demikian pula dengan kesehatan para kolonis dapat dikatakan cukup baik, malaria harus diakui seringkali diderita penduduk, untungnya tidak begitu parah. Jumlah kematian pada balita dan anak-anak adalah cukup besar, tetapi perbaikan pada keadaan masyarakat setempat dengan orang-orang kolonis pasti turut mempengaruhinya dan mendapat perhatian pemerintah. Namun yang tak kalah pentingnya adalah bahwa sejak kedatangan para kolonis tersebut, mereka semua sudah dianggap sebagai kaula *landschap* dan sesudah tiga tahun sejak kedatangan mereka telah menjadi wajib pajak dan wajib kerja rodi. Artinya mereka yang datang pada 1937, mulai bekerja rodi pada 1940 sebanyak 26 hari dan *sima* (pajak) badan sebesar f. 3.20 (Leyds,1940:98; Amir,2016:100).

Perlu dikemukakan bahwa sebelum para kolonis Jawa akan dibawa ke Mapilli, telah ditempatkan juga orang-orang transmigrasi lokal (etnik Bugis dari Sidenreng, Rappang, Teteaji, Batubatu, Soppeng, WetteE, dan Enrekang) di daerah Mapilli atau tidak jauh dari lokasi kolonisasi pada 1936. Daerah ini kemudian dikenal dengan nama Desa Ugibaru (Arsip Polmas, No. 187; Nahrawi, wawancara di Sidodadi tanggal 21 Mei 2106). Terhadap mereka dan termasuk daerah kolonisasi, disediakan empat dam atau bendungan irigasi untuk mengairi seluruh daratan di Mapilli dan daerah sekitarnya.

Keempat pengairan itu, yaitu Gamogamo, Andau, Tumpiling Kecil, dan Tumpiling Besar. Orang-orang transmigrasi lokal itu kemudian semuanya dipindahkan ke tanah yang harus diairi oleh pengairan Andau. Pemeliharaan pengairan tersebut adalah dalam tangan pemerintah Hindia Belanda, karena pengairan yang baik yang dahulu diperuntukkan bagi para transmigrasi lokal, yaitu pengairan Gamogamo. Namun pengairan tersebut, kemudian diperuntukkan bagi seluruh daerah kolonisasi. Pada mulanya sumber air disuplai dari beberapa sungai-sungai kecil kira-kira 5 – 8 km, di sebelah utara jalan raya (poros Polewali –Majene). Untuk itu dibangun saluran irigasi dan sebuah tanggul yang panjang, yaitu tanggul Gamogamo di satu pihak berfungsi sebagai tempat penyimpanan air, dan di lain pihak untuk mencegah seluruh dataran itu tidak dibanjiri oleh air yang tidak dikehendaki. Tanggul ini selesai pada 1939 dan di kemudian hari air dari Sungai Malosso akan dialirkan melalui saluran Gamogamo (Leyds,1940:102).

Dari Kolonisasi Ke Transmigrasi

Pemindahan penduduk dari Pulau Jawa ke Sulawesi Selatan dimulai pada 1937, yaitu ke lokasi kolonisasi di Bungi (Pinrang) dan Mapilli (Polewali). Pada tahun 1938 menyusul pembukaan dua lokasi kolonisasi baru di Sulawesi Selatan, yaitu Kalaena dan Tamuku Kabupaten Luwu. Untuk tiap kolonis disediakan satu hektar atau *bouw* tanah sawah dan 1/5 hektar tanah pekarangan.

Kolonisasi selanjutnya dibuka di Lamasi dalam tahun 1940. Kolonisasi Lamasi ini letaknya sekitar 20 km dari Kota Palopo (ibu kota Kabupaten Luwu). Perkembangan jumlah penduduk kolonisasi di Sulawesi Selatan hingga akhir Desember 1940, adalah sebagai berikut: Mapilli (5.490) jiwa; Bungi (681) jiwa; Kalaena (8.637 jiwa); Tamuku (7.342) jiwa; Lamasi(810) jiwa, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 22.920 jiwa. Namun berdasarkan statistik resmi dari Jawatan Transmigrasi pada 1951, jumlah penduduk kolonisasi tersebut di atas hanya 22.779 jiwa. Perbedaan ini antara lain disebabkan karena adanya pemindahan para

kolonis yang sulit diawasi (Kementerian Penerangan, 1953:462).

Selama pendudukan Jepang, boleh dikatakan semua tempat-tempat kolonisasi terlantar dan tidak terpelihara. Pemindahan kolonisasi untuk bertani terhenti. Yang bergiat pada waktu itu adalah pemindahan “*romusha*” ke tempat-tempat pertahanan militer Jepang. Pemindahan semacam ini tidak hanya tidak teratur pelaksanaannya, tetapi juga tidak mengenal perikemanusiaan. Para *romusha* tidak mendapat cukup makan, kerja paksa melewati batas perikemanusiaan bahkan disertai pukulan-pukulan hebat. Kesehatan mereka tidak mendapat perhatian sehingga ribuan dari mereka mati di tempat kerja (Kasman Suajiman, wawancara di Bumiayu tanggal 17 Mei 2016; Waluyo, wawancara di Mangkutana tanggal 2 Maret 2018).

Kolonis-kolonis yang telah dipindahkan sebelum Perang Dunia II, tidak luput dari perlakuan itu. Mereka dibawa ke sana ke mari sebagai *romusha* dan banyak dari mereka tidak dapat kembali lagi. Sebagian besar sawah, ladang, dan pekarangan mereka terlantar. Pada akhir tahun 1944 statistik penduduk kolonis-kolonis di Sulawesi Selatan tercatat sebagai berikut: Mapilli (6.922) jiwa, Bungi (656) jiwa, Kalaena (6.255) jiwa, Tamuku (4.346) jiwa, dan Lamasi (1.593) jiwa, dengan jumlah keseluruhannya 19,772 jiwa. Perkembangan penduduk yang normal bertambah rata-rata tiap tahun 1,5 %. Jadi dalam 4 tahun (1940-1944) seharusnya penduduk kolonisasi di Sulawesi Selatan meningkat menjadi 24.300 jiwa. Namun kenyataannya hanya berjumlah 19.772 jiwa. Ini berarti bahwa sekitar 18% atau 4.500 jiwa dari penduduk koloniasasi menjadi korban *romusha* (Kementerian Penerangan,1953:463).

Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu pada pertengahan Agustus 1945, terdapat sedikit kelonggaran dalam kalangan penduduk kolonisasi. Pekerjaan *romusha* telah terhenti dan mereka sebagian kembali ke rumah dalam keadaan menyedihkan. Tenaga telah hampir habis, penyakit merajalela, sementara, sawah, ladang, dan pekarangan telah terlantar serta perlu dibangun kembali. Penduduk kolonisasi pada umumnya

bertambah sejak 1945, kecuali di Kalaena yang makin berkurang hingga tahun 1949. Penurunan jumlah kolonis di Kalaena, bukan saja karena arus perjuangan kemerdekaan saat itu, melainkan juga karena terganggu oleh gerakan DI/TII Kahar Muzakkar, sehingga banyak yang mengungsi ke Poso (Sulawesi Tengah) dan Lamasi. Demikian juga penduduk kolonisasi di Bungi banyak yang berpindah ke Mapilli (Sastro Prawiro, wawancara di Mangkutana tanggal 3 Maret 2018; Kasman Suajiman, wawancara di Bumiayu tanggal 22 Mei 2016).

Masa pemerintahan Negara Indonesia Timur (NIT) telah dibentuk satu badan untuk mengurus dan melanjutkan pekerjaan dari CCKI (*Centraal Comité Kolonisatie voor Inheemsen*) yang dibentuk pada zaman pemerintah Hindia Belanda. Namun badan tersebut belum juga dapat melaksanakan sesuatu bagi peningkatan kesejahteraan kolonisasi di Indonesia Timur, kecuali memberikan subsidi untuk pemindahan lokasi dari Gorontalo ke Dataran Pagujaman. Pelaksanaan pemindahan ini pun baru dilaksanakan sesudah penyerahan kedaulatan. Pada waktu penyerahan kedaulatan (Desember 1949) statistik penduduk kolonisasi di Sulawesi Selatan menunjukkan peningkatan sebagai berikut: Mapilli (7.640) jiwa; Bungi (689) jiwa; Kalaena (5.197) jiwa; Tamuku (4.623 jiwa); Lamasi (2.063) jiwa, dengan keseluruhannya 20.213 jiwa (Kementerian Penerangan, 1953:463).

Sampai saat penyerahan kedaulatan, pelaksanaan pemindahan penduduk dan urusan tentang kolonisasi, pada mulanya menjadi tugas Kementerian/ Departemen Dalam Negeri. Namun dalam perkembangannya, pelaksanaan pemindahan penduduk yang sebelumnya disebut dengan kolonisasi berubah menjadi transmigrasi yang merupakan tugas Kementerian Pembangunan Masyarakat. Dengan Peraturan Menteri Pembangunan Masyarakat RI No.1 tahun 1950, didirikan Kantor Transmigrasi (jawatan dalam pertumbuhan) yang diberi tugas khusus untuk melaksanakan penyelenggaraan transmigrasi. Kemudian mulai 1 Mei 1950, Kantor Transmigrasi berubah menjadi Jawatan

Transmigrasi berdasarkan penetapan Menteri Pembangunan Masyarakat RI No. 5/26 tahun 1950. Jawatan Transmigrasi ini di bawah pimpinan Suratno Sastroamidjojo (Kementerian Penerangan, 1953:463).

Terjadinya perubahan ketatanegaraan pada 1950, negara-negara bagian dalam lingkungan Republik Indonesia Serikat (RIS) dibubarkan dan digabungkan menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1950. Sejak itu, Kementerian Pembangunan Masyarakat ditiadakan dan Jawatan Transmigrasi dimasukkan ke dalam Kementerian Sosial berdasarkan penetapan Perdana Menteri Republik Indonesia No. 18/P.N./1950 tanggal 20 Oktober 1950. Sebagai tindak lanjut dari penetapan tersebut, ditetapkanlah berdirinya Jawatan Transmigrasi berdasarkan keputusan Menteri Sosial No. Kab.10-6-20 tanggal 2 Februari 1951. Pimpinan Jawatan Transmigrasi diserahkan kepada Ir. A.H.O. Tambunan yang dulunya memimpin Bagian Transmigrasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kementerian Penerangan, 1953:464).

Kebijakan transmigrasi dari pemerintah Indonesia adalah sangat berbeda dengan yang dijalankan oleh pemerintah Hindia Belanda. Sebab tujuan dari kolonisasi ciptaan pemerintah Hindia Belanda, terutama untuk mendapat tenaga kerja murah bagi perkembangan kapitalis asing. Demikian pula dengan kebijakan *romusha* dari pemerintah Jepang, bertujuan mengeksploitasi tenaga kerja untuk kepentingan industri perang Jepang dalam Perang Dunia II. Sementara kebijakan transmigrasi dari pemerintah Indonesia bertujuan untuk pembangunan ekonomi rakyat dan negara dalam segala bidang dengan jalan memencarkan tenaga-tenaga produktif ke tempat-tempat yang ditunjuk sebagai daerah pembangunan (Harjono, 1977:17; Martono, 1985: iv).

Jawatan Transmigrasi dari pemerintah Republik Indonesia baru mulai melebarkan sayapnya ke Sulawesi pada pertengahan 1951, dengan mengirimkan Ramlan Kosasih ke Makassar untuk meninjau kemungkinan pendirian Kantor Transmigrasi untuk Provinsi Sulawesi. Tindak lanjut dari kunjungan itu, maka diangkatlah E.B. Supit sebagai Acting

Kepala Jawatan Transmigrasi Provinsi Sulawesi pada 12 Oktober 1951. Pekerjaan yang dilaksanakan sampai akhir 1951, baru bersifat pemindahan dan penyusunan organisasi kantor. Kemudian pendirian secara resmi Jawatan Transmigrasi Provinsi Sulawesi di Makassar ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Jawatan Transmigrasi Pusat pada 25 Agustus 1952 No. U-1-44-24. Sejak itu pelaksanaan kegiatan Jawatan Transmigrasi Provinsi Sulawesi mulai berjalan sekalipun dengan mengalami banyak kesulitan yang sulit dipecahkan.

Pembentukan Jawatan Transmigrasi tersebut, berpengaruh pula terhadap Kolonisasi Mapilli sebab kurang lebih setahun sebelumnya, Ahmad Lamo yang ketika itu menjabat sebagai Komandan Kompi Yon Andi Mattalatta di Mandar, mengusulkan kepada Asisten Wedana R. Soeparman untuk mengganti nama Kolonisasi Mapilli menjadi nama yang sesuai realitas atau yang merepresentasikan asal dari para kolonis pada awal 1950-an. Usul itu mendapat respon dengan baik dan setelah dilakukan serangkaian pembicaraan dengan tokoh-tokoh masyarakat, akhirnya disepakati nama Wonomulyo. Sejak itu lokasi para kolonis di Mapilli berubah menjadi Wonomulyo setingkat distrik. *Wono* dalam bahasa Jawa berarti hutan, dan *mulyo* berarti mulia. Jadi *wonomulyo* berarti hutan yang membawa kemuliaan atau kebahagiaan (Salma,1990:2; Warsito, wawancara di Sugiwaras pada 18 Mei 2016).

Berdasarkan data kependudukan tentang transmigrasi dalam Provinsi Sulawesi pada akhir 1951 adalah sebagai berikut: (Wonomulyo (8.821) jiwa; Bungi (689) jiwa; Kalaena (5.118) jiwa; Tamuku (4.893) jiwa; Lamasi (2.441) jiwa; dan Pagujaman 288 jiwa, dengan jumlah keseluruhannya 22.243 jiwa. Perkembangan Jawatan Transmigrasi selama 1952, walaupun belum memuaskan tetapi cukup mendapat kemajuan, dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Dalam tahun tersebut, telah dipindahkan sejumlah 338 jiwa dengan biaya pengangkutan Rp 9.078.80. Pemindahan itu baru transmigrasi keluarga, yakni mereka yang dipanggil oleh keluarga atau famili yang usahanya telah berhasil baik

di daerah transmigrasi (Kementerian Penerangan,1953:464).

Transmigrasi umum di Sulawesi, terutama di Sulawesi Selatan belum berjalan sebagaimana yang diharapkan selama 1952, karena banyak kendala-kendala yang dijumpai. Selain karena Jawatan Transmigrasi sedang dalam penataan oragnisasi, juga karena masalah keuangan serta terganggunya keamanan di Sulawesi Selatan, sehingga sangat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan. Pada akhir 1952 jumlah penduduk pada lokasi-lokasi transmigrasi di Provinsi Sulawesi adalah sebagai berikut: Wonomulyo (9.918) jiwa; Bungi (763) jiwa; Kalaena (5.265) jiwa; Tamuku (4.985) jiwa; Lamasi (2.500) jiwa; dan Pagujaman (350) jiwa, dengan jumlah keseluruhannya 23.781 jiwa (Kementerian Penerangan, 1953:465). Data tersebut menunjukkan bahwa Wonomulyo dan Lamasi mengalami perkembangan jumlah transmigrasi yang signifikan. Wonomulyo misalnya bertambah jumlah transmigrasinya lebih 1.000 jiwa dalam setahun.

Selain karena faktor kelahiran, perkembangan jumlah transmigran di Wonomulyo dalam sepuluh tahun terakhir yang menghampiri dua kali lipat, juga karena kedatangan transmigran baru dari Jawa. Di samping itu, juga karena perpindahan sejumlah transmigran ke daerah yang dianggap aman, terutama di Wonomulyo dan Lamasi. Sebab pada kedua daerah ini ditempatkan markas TNI untuk pengamanan dan menumpas gerombolan DI/TII. Oleh karena itu, perkembangan transmigrasi di Wonomulyo dengan luasnya sekitar 3.500 hektar mencapai hasil yang sangat memuaskan. Pasar Wonomulyo menjadi pusat perdagangan bahan makanan sehingga menjadi salah satu pasar yang terpenting dalam wilayah Mandar (Abd. Madjid Anwar, wawancara di Wonomulyo tanggal 23 Mei 2016). Itulah sebabnya Wonomulyo tidak hanya dapat menjadi contoh bagi distrik-distrik atau kampung-kampung di sekitarnya, tetapi juga bagi lokasi-lokasi transmigrasi lainnya di Sulawesi Selatan.

Keberhasilan tersebut juga tampak pada persatuan dan kesatuan antara para transmigran dengan masyarakat sekitarnya

yang sangat baik, sehingga mereka dapat menciptakan berbagai macam usaha pembangunan atas dasar gotong royong. Pada akhir 1952, mereka telah berhasil mendirikan tiga buah sekolah rakyat enam tahun, satu SMP, dan SGB. Bangunan umum lainnya adalah satu pesanggrahan, satu masjid, dan satu poliklinik. Ketiga gedung ini terbuat dari batu dan keadaannya bersih, sehingga menarik perhatian umum. Bantuan dari pihak pemerintah pusat boleh dikatakan sudah tidak ada, kecuali bantuan pengangkutan dan beberapa peralatan kepada mereka yang baru datang dari Jawa karena dipanggil oleh keluarganya (Sukiman, wawancara di Sidodadi 19 Mei 2016).

Lokasi transmigrasi di Wonomulyo telah penuh dan tidak dapat ditambah lagi dengan transmigrasi-transmigrasi baru. Sebab berdasarkan data kependudukan pada akhir 1953, bahwa Distrik Wonomulyo yang luasnya hanya 3.500 hektar, jumlah penduduknya telah mencapai sekitar 10.000 jiwa atau sekitar 300 jiwa/km persegi. Hal ini berarti bahwa angka kepadatan penduduk telah tinggi. Karena kepadatan penduduk di Jawa rata-rata sekitar 390 jiwa/km persegi, sementara di Sulawesi rata-rata sekitar 30 jiwa/km persegi (Kementerian Penerangan, 1953:465). Itulah sebabnya kedatangan para transmigrasi spontan atau usaha dan kehendak sendiri, ditempatkan atau penempatan lahan di luar lokasi transmigrasi yang ada sebelumnya sejak 1954. Mereka pada umumnya membeli lahan dari penduduk setempat yang letaknya tidak jauh dari lokasi transmigrasi Wonomulyo (Sumirang, wawancara di Matakali tanggal 20 Mei 2016).

PENUTUP

Kebijakan pemerintah Hindia Belanda tentang kolonisasi, bukan hanya bertujuan memindahkan penduduk dari daerah yang padat di Pulau Jawa ke daerah yang kurang penduduk di luar Pulau Jawa, melainkan juga untuk menyediakan tenaga kerja (kuli) murah bagi perusahaan-perusahaan milik Belanda atau banga Asing lainnya, baik yang sudah berdiri maupun yang akan didirikan di luar

Pulau Jawa. Pada awal pelaksanaan kolonisasi 1905, Keresidenan Kedu (terutama Kabupaten Purworejo, Kebumen, dan Karanganyar) dipilih sebagai daerah yang sebagian penduduknya dipindahkan ke daerah tujuan kolonisasi di Gedung Tataan (Lampung). Meskipun pelaksanaan kolonisasi belum memuaskan pemerintah Hindia Belanda, pengiriman para kolonis Jawa ke berbagai daerah di Hindia Belanda tetap berlangsung, baik di Sumatra (terutama Lampung) maupun di Kalimantan dan Sulawesi.

Penempatan para kolonis Jawa secara bertahap di Sulawesi Selatan, terutama di Distrik Mapilli Onderafdeling Polewali (sekarang Sulawesi Barat) mulai dilaksanakan pada 1937. Pada tahap awal tercatat 115 keluarga dengan 380 jiwa kolonis Jawa ditempatkan di desa inti yang kemudian dikenal dengan Desa Sidodadi. Menyusul penempatan para kolonis Jawa berikutnya di lokasi-lokasi sekitar Desa Sidodadi yang kemudian membentuk desa tersendiri, yaitu Desa Sumberjo, Desa Siderejo, Desa Campurjo, Desa Bumiayu, Desa Arjosari, dan Desa Kebusari. Sampai tahun 1940, tercatat 1.569 keluarga dengan 5.490 jiwa kolonis Jawa yang tersebar pada tujuh desa di daerah kolonisasi Mapilli. Pada awal 1950-an, lokasi para kolonis di Mapilli berubah menjadi Wonomulyo setingkat distrik dan penduduknya menjadi binaan Jawatan Transmigrasi Provinsi Sulawesi sejak tahun 1952.

Wonomulyo merupakan daerah kolonis atau transmigran yang paling berkembang di Sulawesi. Bahkan Wonomulyo bukan hanya menjadi contoh bagi distrik-distrik atau kampung-kampung di sekitarnya, melainkan juga menjadi salah satu pasar yang terpenting dan pusat perdagangan bahan makanan di Mandar. Demikian pula interaksi antara para transmigran dengan penduduk lokal tidak menemui banyak kendala, sehingga keharmonisan antaretnik dapat terjalin dengan baik. Namun daerah ini telah penuh dan tidak dapat menampung lagi para pendatang atau transmigran baru sebab berdasarkan data kependudukan pada akhir 1953, bahwa Distrik Wonomulyo yang luasnya hanya 3.500 hektar, jumlah penduduknya telah mencapai sekitar

10.000 jiwa atau sekitar 300 jiwa/km persegi. Hal ini berarti bahwa angka kepadatan penduduk telah tinggi. Itulah sebabnya kedatangan para transmigrasi spontan atau swakarsa sejak 1954, ditempatkan atau penempati lahan di luar lokasi transmigrasi yang ada sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Arsip

- Advies Raad van Indie, 25 Maret 1904, No.30. Arsip Nasional RI.
- Advies Raad van Indie, 6 Februari 1925, No.22. Arsip Nasional RI.
- Arsip Polewali, No. 58 dan 187. Koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan.
- Benenlands Bestuur No.5893. Arsip Nasional RI.
- Besluit Gubernur General Hindia Belanda (GGHB), 30 September 1902, No.17; Besluit GGHB, 7 Maret 1906, No.5; Besluit GGHB, 20 November 1907, No.4; Besluit GGHB, 7 Maret 1906, No.5; Besluit GGHB, 8 Februari 1909, No.7; Besluit GGHB, 9 Juni 1909, No.27; Besluit GGHB, 19 Oktober 1911, No.30; Besluit GGHB, 20 Februari 1913, No.30; Besluit GGHB, 21 April 1913, No.37; Besluit GGHB, 23 April 1930, No.10; dan Besluit GGHB, 14 Agustus 1930, No.14. Arsip Nasional RI.
- Besluit Residen Lampung, 9 Agustus 1911, No.2748. Arsip Nasional RI.
- Brief Gouvernement Secretaris (BGS), 18 September 1928, No.2013/8. Arsip Nasional RI.
- Kolonisatie Bulletin, 1937, No.4. Centrale Commissie voor Emigratie en Kolonisatie van Inheemschen. Arsip Nasional RI.
- Leyds, W.J. 1940. *Memori van Overgave, Assistant Resident Mandar*. Majene: 9 Februari 1940.
- Missie Gouvernement Secretaris, 18 Februari 1905, No.718. Arsip Nasional RI.

Buku, Jurnal, Majalah, Tesis, dan Disertasi

- Abbas, Ibrahim. 1999. *Pendekatan Budaya Mandar*. Majene: Hijrah Grafika.
- Admosudirdjo, Prajudi. 1970. *Sejarah Ekonomi Sosiologie Indonesia*. Jakarta: Pradnja Paramita.
- Alimuddin, Muhammad Ridwan. 2005. *Orang Mandar Orang Laut*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).
- Amir, Muhammad. 2016. *Penataan Mandar Pada Masa Kolonial Belanda 1905-1942*. Makassar: Arus Timur.
- Bachtiar, Ridasari. 2000. Hubungan Antara Budaya Mandar dan Budaya Jawa di Desa Campurjo, dalam *Laporan Penelitian Sejarah dan Nilai Budaya Sulawesi Selatan*. Makassar: BKSNT.
- Bahri, Syamsul. 1997. Selayang Pandang Transmigrasi Jawa di Desa Bumiayu Kabupaten Polewali Mamasa, dalam *Buletin Triwulan Bosara*, No.7/Tahun III
- Craendijk, H. 1918. De Kolonisatie proef in de Lamongsche Distrotten, dalam *Koloniale Studien*, Jilid 2.
- Darmiati. 1997. Perpindahan Penduduk Dari Kolonisasi/Emigrasi Hingga Transmigrasi, dalam *Kongres Nasional Sejarah (1996), Subtema Dinamika Sosial Ekonomi*. Jakarta: Depdikbud.
- Elst, P. van der. 1986. Krisis Budidaya Padi di Jawa, dalam Sayogyo dan W.L. Collier, *Budi Daya Padi di Jawa*. Jakarta: Gramedia.
- Heeren, H.J. 1979. *Transmigrasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Heyting, H.G. 1938. De Les van Wortelvest Gedong Tataan, dalam *De Indische Gids*, Jilid 2.

- Kementerian Penerangan. 1953. *Provinsi Sulawesi*. Makassar: Djawatan Penerangan Republik Indonesia.
- Martono. 1985. Kata Sambutan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, dalam Sri Edi Swasono dan Masri Singaribuan, *Sepuluh Windu Transmigrasi di Indonesia 1905-1985*. Jakarta: UI Press.
- Poelinggomang, Edward L. 2002. *Makassar Abad XIX, Studi Tentang Kebijakan Perdagangan Maritim*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).
- Poelinggomang, Edward L. 2012. *Sejarah dan Budaya Sulawesi Barat*. Makassar: de la macca.
- Rahman, Darmawan Mas'ud. 1988. *Puang dan Daeng, Kajian Sistem Nilai Budaya Orang Balanipa Mandar*. Ujung Pandang: Disertasi Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
- Saharuddin. 1985. *Mengenal Pitu Babana Binanga (Mandar) dalam Lintasan Sejarah Pemerintahan Daerah di Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: CV. Mallomo Karya.
- Salma, A. R. 1990. *Wonomulyo Selayang Pandang*. Wonomulyo: Depdikbud.
- Sayogyo. 1986. Transmigrasi di Indonesia 1905-1985: Apa yang Kita Cari Bersama?, dalam Sri Edi Swasono dan Masri Singaribuan, *Sepuluh Windu Transmigrasi di Indonesia 1905-1985*. Jakarta: UI Press.
- Schalkwijk, W.J. 1918. De Kolonisatieproeven in de Lampongsche Districten, dalam *Koloniale Studien*, Jilid 2.
- Sinrang, A. Syaiful. 1994. *Mengenal Mandar Sekilas Lintas*. Ujung Pandang: Pemerintah Daerah Tingkat II Majene.
- Sjamsu, M. Amral. 1956. *Dari Kolonisasi Ke Transmigrasi*. Djakarta: Djembatan
- Sudarno. 1997. Kolonisasi di Gedung Tataan (Lampung) Tahun 1905-1917, dalam *Kongres Nasional Sejarah (1996)*, Subtema *Dinamika Sosial Ekonomi*. Jakarta: Depdikbud.
- Sumedi, Gunt. 2014. *Wonomulyo: Potret Kampoeng Jawa di Sulawesi Barat*. Makassar: de la macca.
- Swasono, Sri Edi. 1985. Kependudukan, Kolonisasi, dan Transmigrasi, dalam Sri Edi Swasono dan Masri Singaribuan, *Sepuluh Windu Transmigrasi di Indonesia 1905-1985*. Jakarta: UI Press.
- Swasono, Sri Edi dan Masri Singaribuan. 1986. *Transmigrasi di Indonesia 1905-1985*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Syah, M.T. Azis. 1997. *Sejarah Mandar Jilid I, II, dan III*. Ujung Pandang: Yayasan Al Azis.
- Utomo, Djoko. 1997. Transmigrasi Awal Abad Ke-20 Hambatan dan Masalah, *Kongres Nasional Sejarah (1996)*, Subtema *Dinamika Sosial Ekonomi*. Jakarta: Depdikbud.
- Utomo, Muhajir dan Rofiq Ahmad. 1997. *90 Tahun Kolonisasi, 45 Tahun Transmigrasi: Redistribusi Penduduk di Indonesia*. Jakarta: Puspa Swara.

Wawancara

- Abd. Madjid Anwar. 2016. Pensiunan dan mantan Camat Wonomulyo, wawancara di Wonomulyo pada 19 dan 23 Mei 2016.
- H. Nahrawi. 2016. Pensiunan PNS, wawancara di Wonomulyo pada 18 dan 21 Mei 2016.
- Kasman Suajiman. 2016. Petani dan mantan Sekdes Bumiayu, wawancara di Bumiayu, Wonomulyo pada 17 dan 22 Mei 2016.
- Sastro Prawiro. 2018. Petani, wawancara di Wonorejo, Kecamatan Mangkutana pada 3 Maret 2018.
- Sukiman. 2016. Petani, wawancara di Wonomulyo pada 19 Mei 2016.

Sumiran. 2016. Petani, wawancara di Matakali, Wonomulyo pada 20 Mei 2016.

Waluyo. 2018. Petani, wawancara di Wonorejo Timur, Kecamatan Mangkuta pada 2 Maret 2018.

Warsito. 2016. Kepala Desa Sugiwaras, wawancara di Wonomulyo pada 18 Mei 2016.